

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

**Surya Agustinus Riffendi<sup>1\*</sup>**, Agus Fatah Hidayat<sup>2</sup>, Astri Siti Fatimah<sup>3</sup>, Beni Hartanto<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya

\*Korespondensi : [suryaagustinus83@gmail.com](mailto:suryaagustinus83@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan fokus khusus pada studi kasus penganggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap proses penganggaran yang berlangsung di Pemerintah Kota Tasikmalaya dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam konteks penganggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor internal yang signifikan meliputi kejelasan tujuan kebijakan yang ditetapkan, ketersediaan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi, karakteristik agen pelaksana kebijakan seperti kompetensi dan komitmen, disposisi atau kecenderungan sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas, serta efektivitas komunikasi baik di dalam organisasi maupun antar berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, faktor lingkungan eksternal juga memainkan peran penting, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal organisasi pelaksana dan kondisi lingkungan eksternal yang melingkupinya.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas Penggunaan Dana Desa.

### **ABSTRACT**

*This research aims to identify and analyze in-depth the factors that support and hinder the implementation of policies regarding the Regional Financial Management System and Procedures within the Tasikmalaya City Government, with a specific focus on a budgeting case study. The research method employed in this study is a qualitative approach. Data collection was conducted through two main techniques: direct observation of the budgeting process within the Tasikmalaya City Government and in-depth interviews with various parties directly and indirectly involved in regional financial management and budget preparation. The research results indicate that the successful implementation of policies concerning the Regional Financial Management System and Procedures in the budgeting context of the Tasikmalaya City Government is influenced by a number of interacting*

*factors. Significant internal factors include the clarity of the established policy objectives, the availability and allocation of adequate resources to support implementation, the characteristics of the implementing agents such as competence and commitment, the disposition or attitudinal tendencies of the implementers in carrying out their duties, and the effectiveness of communication both within the organization and among various involved parties. Furthermore, external environmental factors also play an important role, including economic, social, and political aspects that can affect the course of policy implementation. Based on these findings, it can be concluded that the effectiveness of regional financial management policy implementation is significantly influenced by the complex interaction between the internal factors of the implementing organization and the surrounding external environmental conditions.*

**Keywords :** *Policy Implementation, Regional Financial Management, Village Fund Usage Priorities.*

## A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur oleh beberapa kerangka hukum yang sangat penting (Rumapea et al., 2025). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah landasan utama yang mengatur pembagian wewenang, tanggung jawab, dan hak antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini memberdayakan otonomi daerah dan mendorong tata kelola desentralisasi dalam berbagai sektor seperti pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melengkapi kerangka ini dengan menetapkan mekanisme bagi hasil pendapatan, transfer dana, dan pinjaman daerah. Tujuannya adalah mendukung desentralisasi fiskal, mengurangi kesenjangan regional, dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai program serta layanan publiknya.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, terdapat dua peraturan pelaksana yang krusial. Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyediakan pedoman terperinci untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan daerah. Peraturan ini berupaya menanamkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menawarkan instruksi operasional dan teknis yang lebih spesifik, memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah secara konsisten dan tepat di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.

Urgensi pengelolaan keuangan daerah juga sangat dirasakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai fondasi utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan batasan defisit anggaran, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 mengatur Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan tersebut, batas maksimal kumulatif defisit

APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar 0,14% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun anggaran 2023. Defisit APBD yang didanai melalui utang daerah tidak boleh melampaui batas maksimal defisit APBD yang telah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

Batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2023 bervariasi berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. Untuk kategori sangat tinggi, batasnya adalah 2,8% dari perkiraan pendapatan daerah, diikuti 2,6% untuk kategori tinggi, 2,4% untuk kategori sedang, 2,2% untuk kategori rendah, dan 2% untuk kategori sangat rendah. Batas maksimal defisit APBD ini khusus untuk defisit yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah. Selain itu, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2023 juga ditetapkan sebesar 0,14% dari proyeksi PDB tahun anggaran 2023, termasuk pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

Sebagai wujud implementasi di tingkat daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan-aturan ini secara rinci mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Kota Tasikmalaya, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang krusial, mencerminkan kebijakan fiskal daerah dan disusun dengan

mempertimbangkan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Setelah melalui proses pembahasan dan evaluasi, APBD ditetapkan oleh DPRD sebagai bentuk legitimasi rencana penggunaan anggaran. Dengan demikian, APBD menjadi instrumen utama bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan warganya.

Tahap selanjutnya setelah penetapan APBD adalah pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. Pelaksanaan anggaran melibatkan realisasi program-program yang telah direncanakan, sementara penatausahaan mencakup pencatatan transaksi keuangan secara sistematis. Kedua proses ini esensial untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Dari hasil penelitian menunjukkan SIPKD dan pengendalian internal memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah secara signifikan dan parsial (Nursyid & Indrayen, 2023).

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengamankan keberadaan Pengelola Keuangan Daerah, yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola Keuangan Daerah dapat memanfaatkan informasi, aliran data, dan dokumen elektronik.

Struktur Pengelola Keuangan Daerah melibatkan berbagai peran dan fungsi, termasuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Wali Kota), Pejabat Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD/PPKD, Kepala

SKPD/PA), dan lain-lain. Wali Kota memiliki kewenangan kunci seperti menyusun dan mengajukan rancangan Perda APBD, menetapkan Perda APBD, serta menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pejabat yang bertugas dalam pemungutan pajak, pengelolaan utang piutang, dan pengujian tagihan.

Pejabat Perangkat Daerah memiliki peran spesifik dalam pengelolaan keuangan. Sekretaris Daerah bertindak sebagai koordinator, Kepala SKPKD sebagai PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), dan Kepala SKPD sebagai PA (Pengguna Anggaran), yang bertanggung jawab dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Dalam menjalankan kekuasaannya, Wali Kota dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan sistem pengendalian internal yang menekankan pemisahan kewenangan antara pihak yang memerintahkan, menguji, dan menerima/mengeluarkan uang. Pelimpahan ini ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan peraturan Wali Kota tersebut menekankan pentingnya laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan anggaran jika diperlukan. Laporan ini memberikan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan dan belanja dibandingkan dengan rencana awal. Selain itu, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan

yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Beberapa definisi tentang kebijakan publik, diantaranya dinyatakan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan publik lainnya, sementara implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata di lapangan, melibatkan berbagai aktor dan sumber daya untuk mencapai dampak yang diharapkan (Abdul wahab, 2016).

Kebijakan publik sebagai suatu pilihan tindakan pemerintah yang terencana dan terorganisir untuk mengatasi masalah publik atau mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat, dan implementasi kebijakan dilihat sebagai tahapan yang krusial dalam siklus kebijakan, di mana keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pihak-pihak terkait (Abidin, 2012).

Pendapat selanjutnya dikemukakan (Agustino, 2008) dengan menyatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan isu-isu publik yang memerlukan penyelesaian, sedangkan implementasi kebijakan adalah proses mengoperasionalkan kebijakan menjadi tindakan-tindakan yang konkret, melibatkan organisasi, kelompok sasaran, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan.

Kebijakan publik sebagai suatu konsep yang melibatkan formulasi tujuan, identifikasi masalah, dan pemilihan

alternatif tindakan oleh otoritas publik untuk mengatasi isu-isu strategis, dan implementasi kebijakan ditekankan sebagai tahapan yang kompleks dan dinamis, memerlukan koordinasi antar berbagai pihak, alokasi sumber daya yang tepat, serta pemahaman terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana (Andriansyah & Fauzi, 2022).

Beberapa hasil penelitian yang relevan diantaranya Pemerintah Kota Bitung telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penatausahaan penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban, lengkap dengan penggunaan dokumen serta batas waktu untuk setiap proses. Namun, sistem penatausahaan pengeluaran belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Ketidaksiharasan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Pejabat Pengelola Keuangan mengenai prosedur, dokumen, dan batas waktu penerbitan SPM dan SP2D, yang berujung pada keterlambatan penerbitan SP2D dan penghambatan pencairan dana (Tambun et al., 2018).

Penelitian selanjutnya menunjukkan sistem akuntansi pengeluaran kas belanja langsung telah terkomputerisasi menggunakan FMIS untuk proses mulai dari penerbitan SPD hingga SP2D-LS. Secara umum, pelaksanaan sistem dan prosedur ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Meskipun demikian, kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan, terutama terkait penggunaan mekanisme LS untuk pembiayaan

perjalanan dinas dan honorarium pengelola keuangan karena adanya keterbatasan jumlah Uang Persediaan (UP), (Abdullah et al., 2024).

Sementara hasil penelitian lainnya menunjukkan Prosedur administrasi pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Boalemo belum berjalan optimal, terutama pada tahap Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan belanja Uang Persediaan (UP). Keterlambatan ini disebabkan oleh kesalahan data seperti nama, OPD, dan nomor rekening SPJ yang sering kali salah atau terlambat dimasukkan, sehingga menghambat proses pengajuan, penerbitan, dan pencairan dana, meskipun penerbitan SP2D sudah berjalan dengan baik (Lakoro & Sukrianto, 2022).

Menganalisis implementasi kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat krusial karena merupakan tolok ukur efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik. Analisis ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan, memungkinkan perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan demikian, hasil analisis dapat menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi untuk optimalisasi kinerja keuangan, pencegahan penyimpangan, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, serta pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai implementasi kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ini menggunakan metode studi literatur sebagai landasan utamanya. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep teoritis, kerangka kebijakan yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan implementasi kebijakan publik. Melalui penelusuran berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, penelitian ini berupaya untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai konteks, tantangan, dan potensi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di Kota Tasikmalaya.

Studi literatur dalam penelitian ini berperan penting dalam mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang relevan untuk dianalisis, merumuskan pertanyaan penelitian yang tajam, serta mengembangkan kerangka konseptual yang kuat. Analisis terhadap literatur yang ada membantu peneliti untuk memahami berbagai perspektif dan pendekatan yang telah digunakan dalam studi serupa, sehingga dapat menghindari pengulangan kesalahan dan membangun di atas pengetahuan yang sudah ada (Sugiyono, 2020). Dengan demikian, metode studi literatur memberikan fondasi teoretis yang kokoh bagi penelitian ini sebelum melangkah ke tahap pengumpulan dan analisis data empiris, jika ada tahapan selanjutnya.

Langkah-langkah dalam studi kasus umumnya meliputi penetapan fokus

penelitian yang jelas, pemilihan kasus yang relevan dan representatif, pengumpulan data secara mendalam melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, analisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola dan tema yang signifikan, serta penyusunan laporan studi kasus yang komprehensif dan mendalam, menyajikan temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian (Cresswell, 2013).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kejelasan tujuan kebijakan penganggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi fondasi utama efektivitas implementasinya. Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah seperti RPJMD, RKPD, dan APBD seharusnya secara eksplisit dan terukur mencerminkan target yang ingin dicapai. Dengan adanya kejelasan ini, seluruh pihak terkait, mulai dari perangkat daerah hingga masyarakat, memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan dan target kinerja yang diharapkan. Hal ini krusial untuk meminimalisir potensi misinterpretasi dan inefisiensi dalam alokasi serta penggunaan anggaran, sehingga sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan visi dan misi kota.

Ukuran keberhasilan kebijakan penganggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat dievaluasi melalui serangkaian indikator kinerja yang komprehensif. Indikator-indikator ini idealnya mencakup berbagai dimensi, mulai dari input (ketepatan waktu penyusunan APBD), proses (tingkat penyerapan anggaran), output (kesesuaian realisasi

dengan rencana kerja), hingga outcome (dampak anggaran terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat). Melalui pengukuran yang sistematis terhadap indikator-indikator ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kebijakan penganggaran dapat menjadi semakin efektif dan akuntabel.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk proses penganggaran di dalamnya, memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya. Alokasi anggaran yang tepat sasaran dan efisien akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik yang esensial. Masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara menyeluruh. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan kurang transparan berpotensi menghambat pembangunan daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

## 2. Faktor Sumber Daya

Ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu merupakan fondasi krusial bagi implementasi kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Tanpa alokasi dana yang mencukupi, berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan berisiko terhambat. Anggaran yang cukup tidak hanya esensial

untuk operasional sistem dan prosedur itu sendiri, seperti pengadaan perangkat lunak dan pelatihan staf, tetapi juga untuk mendukung program dan kegiatan yang dihasilkan dari proses penganggaran yang baik. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan implementasi yang parsial, penundaan inovasi, dan bahkan menggagalkan pencapaian tujuan transparansi dan akuntabilitas.

Aspek sumber daya manusia, baik dari segi kualitas kompetensi maupun kuantitas personel, menjadi pilar penting dalam menjamin keberhasilan implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Proses penganggaran yang efektif menuntut personel yang kompeten, memiliki pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, dan mahir dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jumlah staf yang proporsional juga penting untuk mendistribusikan beban kerja secara merata. Investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas proses penganggaran dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Aksesibilitas terhadap teknologi informasi memainkan peran strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi memiliki potensi besar untuk memfasilitasi proses penganggaran yang lebih efisien, akurat, dan terbuka. Kemudahan dalam mengakses data anggaran dan realisasi memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk melakukan pengawasan

dan evaluasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu memprioritaskan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan memastikan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut secara optimal demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Faktor Karakteristik Pelaksana Kebijakan**

Pengalaman pelaksana kebijakan dalam mengelola keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi faktor signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama dalam penganggaran. Pelaksana dengan rekam jejak yang panjang dan pemahaman mendalam cenderung lebih mahir dalam mengidentifikasi hambatan, merancang strategi implementasi yang efektif, serta mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Pengalaman ini memungkinkannya mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan pengetahuan untuk memastikan proses penganggaran berjalan sesuai tujuan. Sebaliknya, minimnya pengalaman dapat menghambat pemahaman kompleksitas pengelolaan keuangan dan berpotensi menimbulkan inefisiensi.

Tingkat profesionalisme, integritas, dan etika kerja para pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan landasan esensial bagi implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Profesionalisme tercermin dalam kemampuan menjalankan tugas sesuai standar, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, serta bertindak objektif dan bertanggung jawab. Integritas

yang tinggi menjamin tindakan jujur, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan penganggaran, meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang. Etika kerja yang baik menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik, yang berdampak positif pada kualitas implementasi kebijakan.

Kemampuan adaptasi pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap perubahan regulasi atau prosedur baru dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek vital dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan penganggaran. Dinamika peraturan dan tuntutan good governance seringkali mengharuskan adanya penyesuaian. Pelaksana dengan kemampuan adaptasi tinggi akan lebih cepat memahami dan mengimplementasikan perubahan, serta mengatasi potensi resistensi. Fleksibilitas dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci bagi pelaksana kebijakan untuk memastikan proses penganggaran tetap relevan, akuntabel, dan sesuai peraturan yang berlaku.

### **4. Faktor Sikap Atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana**

Sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Motivasi individu untuk mencapai tujuan kebijakan tercermin dalam dedikasi dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas penganggaran sehari-hari. Pelaksana yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih proaktif, memahami setiap tahapan sistem dan prosedur, serta berupaya mencapai

hasil optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Komitmen ini melampaui sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun juga mencakup inisiatif dalam mencari solusi atas berbagai kendala implementasi.

Selanjutnya, persepsi para pelaksana terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah turut membentuk efektivitas implementasi kebijakan. Pemahaman mendalam akan kedua prinsip ini akan memengaruhi caranya bekerja dan berinteraksi dengan data serta informasi keuangan. Pelaksana yang menjunjung tinggi transparansi akan lebih terbuka dalam menyajikan informasi anggaran dan prosesnya, serta bersedia untuk diawasi dan dievaluasi. Kesadaran akan akuntabilitas mendorongnya untuk bekerja secara cermat dan bertanggung jawab, memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kredibel.

Respons para pelaksana terhadap umpan balik dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap terbuka terhadap kritik dan saran mencerminkan kemauan untuk terus belajar dan melakukan perbaikan. Pelaksana yang responsif akan memanfaatkan umpan balik sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi kekurangan dalam sistem atau prosedur, serta mencari cara untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan beradaptasi dan melakukan penyesuaian berdasarkan masukan konstruktif akan memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kepercayaan

publik.

## **5. Faktor Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi antar organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, terutama antara Bappelitbangda, BPKAD, dan berbagai SKPD, memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam siklus penganggaran. Intensitas dan kualitas komunikasi yang terjalin secara langsung memengaruhi pemahaman bersama mengenai tujuan dan mekanisme penganggaran. Pertemuan rutin, pertukaran dokumen yang efektif, serta dialog konstruktif antar unit kerja menjadi indikator penting dalam memastikan kelancaran proses penganggaran. Kejelasan pesan, ketepatan waktu penyampaian informasi, serta responsivitas terhadap kendala yang muncul menjadi fondasi bagi terciptanya implementasi kebijakan yang efektif dan akuntabel.

Mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terintegrasi antar organisasi yang terlibat dalam siklus penganggaran di Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi aspek fundamental lainnya. Proses penyusunan anggaran yang melibatkan berbagai tingkatan dan unit kerja memerlukan mekanisme yang jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, penetapan jadwal yang terkoordinasi, serta forum-forum diskusi reguler. Koordinasi yang efektif mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan, mengurangi risiko keterlambatan dalam penyelesaian tahapan anggaran, serta memastikan adanya sinkronisasi yang baik antara perencanaan dan penganggaran. Tanpa koordinasi yang solid, efisiensi dan efektivitas pengelolaan

keuangan daerah dapat terhambat secara signifikan.

Pemanfaatan platform digital atau SIPD-RI memiliki potensi besar dalam memfasilitasi pertukaran informasi antar organisasi di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Keberadaan dan optimalisasi sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas komunikasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Pertukaran data anggaran, dokumen pendukung, serta informasi relevan lainnya secara elektronik dapat mempercepat proses, meminimalisir kesalahan akibat pertukaran informasi manual, serta memudahkan akses bagi pihak-pihak terkait. Selain itu, platform digital juga dapat mendukung forum diskusi daring, penyebaran informasi kebijakan, serta pelaporan perkembangan implementasi anggaran secara real-time, yang pada akhirnya mendorong partisipasi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **6. Faktor Sikap Para Pelaksana**

Analisis terhadap implementasi kebijakan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya dalam studi kasus penganggaran, mengungkapkan bahwa tingkat dukungan dari para pelaksana kebijakan memainkan peran penting. Dukungan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana para pelaksana mempersepsikan manfaat kebijakan tersebut bagi masyarakat. Apabila melihat adanya potensi dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan warga, seperti alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tingkat dukungan cenderung tinggi. Sebaliknya, keraguan akan efektivitas kebijakan atau kurangnya kejelasan manfaat bagi masyarakat dapat

menurunkan tingkat dukungan, bahkan memicu resistensi. Pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan potensi dampak positif kebijakan menjadi fondasi penting dalam membangun dukungan yang kuat dari para pelaksana.

Keterbukaan para pelaksana untuk menerima kritik dan saran dari pihak eksternal terkait proses penganggaran menjadi indikator vital dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Sikap inklusif ini mencerminkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem yang ada. Pelaksana yang bersedia mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pengawas, menunjukkan kesadaran akan pentingnya perspektif yang beragam dalam memperkaya pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas. Keterbukaan ini juga berperan dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi kebijakan yang diimplementasikan.

Kesiapan para pelaksana di Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk berinovasi dalam metode pengelolaan keuangan demi meningkatkan efektivitas merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Inovasi dapat berupa pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan anggaran, pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efisien, atau adopsi praktik-praktik terbaik dari daerah lain. Pelaksana yang proaktif mencari cara-cara baru untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan transparansi menunjukkan komitmen untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tasikmalaya.

Kemauan untuk beradaptasi dan berinovasi akan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

#### **7. Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik**

Stabilitas ekonomi daerah memainkan peran penting dalam membentuk arah dan fokus penganggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya. Ketika kondisi ekonomi stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif, pemerintah memiliki keleluasaan fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pada berbagai program pembangunan dan peningkatan layanan publik. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang tidak stabil atau mengalami kontraksi dapat membatasi sumber pendapatan daerah dan memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian prioritas anggaran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ekonomi lokal menjadi krusial dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan penganggaran. Struktur demografi, tingkat kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan layanan publik lainnya menjadi pertimbangan utama dalam alokasi anggaran. Kebijakan penganggaran yang responsif terhadap kondisi sosial akan berupaya untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik sosial

masyarakat menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan dan inklusif.

Lingkungan politik di tingkat lokal dan nasional turut memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dinamika kepentingan politik lokal dapat memengaruhi proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran. Stabilitas politik dan dukungan yang kuat dari para pemangku kepentingan politik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Sebaliknya, ketidakstabilan politik atau adanya konflik kepentingan dapat menghambat proses penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

#### **D. KESIMPULAN**

Kebijakan penganggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya memerlukan kejelasan tujuan yang tercermin dalam dokumen perencanaan, ukuran keberhasilan melalui indikator kinerja yang komprehensif, dan implementasi yang berdampak positif pada layanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu, kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi. Karakteristik pelaksana kebijakan seperti pengalaman, profesionalisme, integritas, etika kerja, dan kemampuan adaptasi juga krusial. Selain itu, disposisi pelaksana yang termotivasi, menjunjung tinggi transparansi dan

akuntabilitas, serta responsif terhadap umpan balik, komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang efektif, dukungan pelaksana terhadap manfaat kebijakan bagi masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, dan kesiapan berinovasi menjadi faktor penentu. Terakhir, lingkungan ekonomi yang stabil, kondisi sosial masyarakat yang diperhatikan, dan lingkungan politik yang kondusif turut memainkan peran signifikan dalam efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul wahab, S. (2016). *ANALISIS KEBIJAKAN*. BUMI AKSARA.
- Abdullah, M., Aswati, W. O., & Rahmasuci, F. (2024). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah. *Akuntansi dan Keuangan*, 09. <https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/147/87>
- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Andriansyah, & Fauzi, D. M. (2022). *Konsep dan Implementasi Kebijakan Publik*. Moestopo Publishing.
- Cresswel, J. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Research design*. <https://doi.org/10.2307/3152153>
- Lakoro, F. S., & Sukrianto. (2022). Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 1. <https://journal.literasisains.id/index.php/mamen/article/download/253/425/2297>
- Nursyid, W. M. N., & Indrayen. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 3. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/download/405/251/>
- Rumapea, L., Pangaribuan, M., Zhara, M. I., Siahaan, M. D., Ringo, P. I. S., Hadiningrum, S., & Siahaan, P. (2025). Peran Hukum dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pemerintahan Daerah. *Pemuliaan Keadilan*, 2. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk/article/download/408/622/2435>
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. ALFABETA.
- Tambun, E. R., Koleangan, R. A. ., & Rumat, V. A. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpekd/article/view/32760>